

Penerapan Konsep Digitalisasi dalam Pencegahan *Stunting* melalui Aplikasi *e-Health Simpati* di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Qothrunnada^{1*}, Fitriyani Aprilia², Novelia Damayanti³, Ivan Darmawan⁴

¹²³⁴ Universitas Padjadjaran

*Email korespondensi: qothrunnada20001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Stunting merupakan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kekurangan gizi yang dialami oleh balita dan anak usia sekolah. *Stunting* ini memiliki dampak pada pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif anak. Hal ini tentu menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, pemerintah perlu memanfaatkan hal tersebut secara optimal. Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini lahirlah *e-government*. *E-government* ini menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan secara daring kepada masyarakat, salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu membuat Aplikasi *e-Health Simpati* yang ditujukan untuk pencegahan serta penurunan angka *stunting* di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dari Aplikasi *e-Health Simpati* dengan menggunakan analisis tiga elemen dalam *e-government*, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aplikasi *e-Health Simpati* ini dapat mencapai keberhasilan dalam menurunkan angka *stunting* selama kurun waktu dari tahun 2018-2022 namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki diantaranya adalah perlunya pemberian perhatian yang khusus untuk meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia serta peningkatan pengetahuan terkait layanan yang berbasis digital.

Kata kunci: Stunting, e-government, e-Health Simpati, Kabupaten Sumedang

Article Info

Received date: 26 November 2023

Revised date: 30 November 2023

Accepted date: 06 December 2023

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO) dalam (Oktaria Batubara et al., 2023) *stunting* adalah hambatan tumbuh kembang yang dialami oleh anak yang diakibatkan karena gizi yang buruk, infeksi berulang serta stimulasi psikososial yang tidak memenuhi kebutuhan. *Stunting* juga dapat diartikan sebagai masalah kekurangan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam periode waktu yang cukup lama akibat dari tidak sesuainya kebutuhan gizi dalam pemberian makanan kepada anak. *Stunting* dapat terjadi sejak janin masih berada di dalam kandungan dan akan terlihat ketika anak memasuki usia dua tahun. Kurangnya gizi pada usia dini ini dapat berdampak pada peningkatan angka kematian bayi dan anak serta membuat penderitanya memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan postur tubuh yang ia miliki saat dewasa tidak akan tumbuh dengan maksimal. *Stunting* juga berdampak pada kurangnya kemampuan kognitif yang dimiliki penderita sehingga akan menyebabkan kerugian yang berjangka panjang dalam sektor ekonomi di Indonesia (Kenanga et al., 2023).

Menurut informasi yang diperoleh dari studi status gizi di Indonesia, prevalensi *stunting* yang ada pada anak balita di Indonesia, Jawa Barat serta Sumedang pada tahun 2021 adalah 24,4 persen, 24,5 persen, dan 22,0 persen (Kementerian Kesehatan RI dalam (Ningrum et al., 2023). Berdasarkan data pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sumedang, angka *stunting* di Kabupaten Sumedang mencapai 40,6% (Patimah et al., 2022). Data-data tersebut menunjukkan bahwa *stunting* menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Pemberian layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk

mempermudah masyarakat, salah satunya dengan penggunaan teknologi yakni dengan penerapan *e-government* dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut Rianto dan Lestari, *e-government* adalah sebuah bentuk interaksi baru yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan pemanfaatan teknologi informasi (utamanya internet) yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kualitas atau mutu pelayanan. Perkembangan yang terjadi pada bidang teknologi dan informatika yang semakin maju ini memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Salah satu contoh pemanfaatannya dapat digunakan dalam bidang pemerintahan yang lebih dikenal dengan *e-government* (e-gov).

Dalam merespons perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah pun berperan dalam pengembangan *e-government* dalam menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* dimulai dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Dalam instruksi ini, pemerintah akan memanfaatkan potensi dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, kemudahan dalam pengaksesan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi secara masif dan akurat. Serta penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan kinerja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penggunaan *e-government* ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Prawira & Paraniti, 2023). Pemerintah daerah maupun pusat berkewajiban dalam pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pelayanan dalam bidang kesehatan yaitu elakukan tindakan dengan pendekatan promosi, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan (Husni, 2023)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pun melaksanakan SPBE dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Pelaksanaan SPBE yang dilakukan dapat dilihat dari adanya aplikasi *e-Health* Simpati (Sistem Pencegahan *Stunting*) yang bertujuan untuk menurunkan angka *stunting* yang ada di Kabupaten Sumedang. Adanya aplikasi *e-Health* Simpati ini menjadi harapan dalam mencegah *stunting* yang ada di Kabupaten Sumedang. Aplikasi *e-Health* Simpati ini berfungsi untuk mengumpulkan serta melaporkan data balita yang berkaitan dengan *stunting*. Aplikasi *e-Health* Simpati dirancang dalam format aplikasi yang ada di dalam Android serta format aplikasi web dan messaging/conversational. Aplikasi *e-Health* Simpati dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kader posyandu dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk pencatatan hasil pemeriksaan badan dan tinggi anak. Pemimpin tingkat daerah, puskesmas, desa, dan instansi terkait lainnya dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan laporan terkait kondisi *stunting*. Selain itu, masyarakat umum dan orang tua juga memiliki akses untuk menggunakan aplikasi ini guna melakukan pengecekan status gizi anak (Husni, 2023)

Upaya untuk menanggulangi *stunting* di Kabupaten Sumedang ini didukung dengan penerapan penggunaan aplikasi *e-Health* Simpati. Melalui platform ini, semua pihak terlibat dapat memahami strategi mengatasi masalah *stunting*. Keberhasilan dalam pengimplementasian pencegahan *stunting* ini mengantarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meraih penghargaan tertinggi dalam kategori daerah pada Digital Government Award – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta pada 20 Maret 2023. Penghargaan ini melibatkan partisipasi dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Wijaya, 2023). Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat mengadopsi teknologi dengan baik sehingga mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan publik.

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya aplikasi *e-Health* Simpati ini, salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh informasi kesehatan. Aplikasi *e-Health* Simpati memudahkan orang tua serta ibu hamil untuk mengakses informasi terkait kesehatan dan gizi terkait tanpa perlu menunggu pertemuan langsung dengan tenaga kesehatan. Fasilitas ini pun bermanfaat untuk para kader dalam melakukan pengawasan atas pertumbuhan anak dan melakukan pemberian nutrisi yang sesuai selama masa awal pertumbuhan (Arief et al., 2023). Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Husni, 2023), ditemukan kekurangan dalam aplikasi *e-Health* Simpati ini, salah

satunya adalah dalam aplikasi *e-Health Simpati* yang telah di-*update* menjadi *e-Health Simpati 2.0* ini penggunaannya terbatas. Pengguna yang memiliki akses ke dalam aplikasi *e-Health Simpati 2.0* hanya dapat memasuki menu yang sesuai dengan peran atau wilayah mereka dan tidak diberikan izin untuk mengakses menu lainnya. Contohnya, pengguna dari pihak desa hanya diberikan akses ke menu yang ada kaitannya dengan administrasi desa tanpa diberikan akses untuk mengakses menu posyandu yang ada di dalam wilayah desa dan hal ini pun berlaku sama kepada semua pengguna yang terlibat.

Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah dan menurunkan angka *stunting* ini patut diapresiasi meskipun ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dari Aplikasi *e-Health Simpati* dengan menggunakan analisis tiga elemen dalam *e-government*, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*.

Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian I Wayan Muka, Made Adi Widyatmika, dan I Ketut Gde Darma Putra (2020)

Berdasarkan penelitian I Wayan Muka, Made Adi Widyatmika, dan I Ketut Gde Darma Putra yang berjudul “Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali” disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melengkapi segala aspek yang dibutuhkan untuk memajukan sistem layanan publik dan teknologi informasi di wilayahnya, termasuk mengesahkan masterplan IT, menerapkan kebijakan layanan perencanaan dan penganggaran, serta mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk IT. Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi dalam menerapkan SPBE diantaranya adalah belum terintegrasinya aplikasi atau system, kurangnya SDM, dan infrastruktur IT yang rendah di berbagai OPD. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan integrasi sistem informasi, SDM, dan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan inisiatif IT di Provinsi Bali.

2. Hasil Penelitian Fakhru Umam Hadi, Tri Yuniningsih, dan Endang Larasati (2023)

Berdasarkan penelitian Fakhru Umam Hadi, Tri Yuniningsih, dan Endang Larasati yang berjudul “Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi Dukcapil *Smart* di Kabupaten Bantul” disimpulkan bahwa Terdapat tiga faktor kunci yang memengaruhi kesuksesan dalam penerapan *E-Government* melalui Aplikasi Dukcapil *Smart* Bantul, yaitu terdapat kesepakatan atas kerangka *Electronic Government (Support)*, ketersediaan infrastruktur yang memadai (*Capacity*), dan ketersediaan aplikasi yang memberikan manfaat yang signifikan (*Value*). Meskipun Aplikasi Dukcapil *Smart* Bantul sudah cukup baik, terdapat beberapa faktor yang menghambat penggunaannya, diantaranya adalah aplikasi ini tidak tersedia di perangkat iOS, waktu layanan yang melebihi aturan dari Kemendagri (1x24 jam) yang disebabkan oleh kelangkaan bahan (blanko) dan antrean yang Panjang, serta alur layanan masih belum optimal, perlu panduan dari petugas untuk Langkah selanjutnya setelah pengajuan aplikasi.

LANDASAN TEORETIS.

E-Government

E-Government merupakan garda terdepan dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuannya dalam menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, pegawai pemerintah, instansi pemerintah lainnya, dan lembaga non-pemerintah (Chen & Perry, 2016). Stiedel dalam (Halachmi, 2004) mendefinisikan *e-government* sebagai bentuk penggunaan teknologi untuk menyediakan informasi publik, barang, dan jasa. Sedangkan, Jain dalam (Halachmi, 2004) berpendapat bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kinerja fungsi pemerintahan. World Bank (2015) memberikan penjelasan bahwa *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk mengubah hubungan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik, interaksi dengan sektor bisnis, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi, dan efisiensi terhadap tata kelola pemerintahan. Hartono, Utomo, dan Mulyanto (2010) mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

“Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah

serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C),” (Hartono, Utomo, dan Mulyanto, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-government merupakan sebuah upaya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan publik.

Tiga Elemen Kunci dalam E-Government

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvard JFK School of Government dalam (Nugraha, 2018), penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik memerlukan tiga elemen kunci yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan serius. Ketiga elemen tersebut yaitu, support, capacity, dan value. Support merupakan elemen yang krusial karena tanpa adanya political will segala upaya untuk membangun dan mengembangkan e-government akan sulit terlaksana. Posisi pimpinan akan menjadi sangat penting karena budaya birokrasi yang cenderung menerapkan model top-down dan memiliki hierarki yang kuat. Adapun bentuk dukungan yang dimaksud, yaitu:

1. Menjadikan framework e-government sebagai salah satu prioritas utama dalam pencapaian visi dan misi negara atau daerah, sehingga dapat menjadi bagian fundamental dari keberhasilan yang lain.
2. Adanya pengalokasian sumber daya yang memadai (tenaga kerja, dana, waktu, informasi, dll.) di seluruh level pemerintahan untuk mendukung konsep e-government melalui pendekatan lintas sektoral.
3. Adanya pembangunan infrastruktur dan regulasi yang dapat mendukung pengembangan e-government.
4. Adanya sosialisasi konsep e-government secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan kepada seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat melalui berbagai upaya penyuluhan yang efektif.

Kemudian, elemen capacity mengacu pada kemampuan atau daya pemerintah setempat dalam mewujudkan gagasan e-government menjadi kenyataan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga) elemen yang harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

1. Sumber daya yang memadai untuk menjalankan inisiatif e-government, khususnya dalam hal keuangan.
2. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, hal ini merupakan faktor penting dalam menyukseskan penerapan e-government.
3. Tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk memastikan implementasi e-government sesuai dengan harapan.

Meskipun salah satu dari ketiga elemen tersebut belum terpenuhi, pemerintah harus tetap berupaya untuk mencari cara efektif supaya seluruh elemen dapat terpenuhi, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan sektor swasta, berkolaborasi dengan entitas non-publik terkemuka, atau menggunakan outsourcing.

Sementara itu, value mengacu pada manfaat dari keberhasilan penerapan e-government yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari pemerintah dalam menentukan aplikasi e-government mana yang harus dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kesalahan dalam menilai kebutuhan masyarakat akan berdampak buruk terhadap pengembangan konsep e-government oleh pemerintah.

METODE

Dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan penggunaan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai keadaan yang sedang diteliti, yaitu implementasi penggunaan Aplikasi Simpati dengan analisis tiga elemen dalam *E-government*, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana keterkaitan antara tiga elemen *e-government* dengan penggunaan aplikasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh

peneliti adalah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka merupakan langkah penting yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan berita yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Adapun informan dari penelitian ini adalah Bu Ating sebagai Kader Posyandu di Desa Galudra, Kabupaten Sumedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Support

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur (penelitian terdahulu, laman berita daring, regulasi terkait) dan wawancara yang telah dilakukan, penerapan dari elemen *support* dapat dilihat pada poin-poin berikut ini:

1. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan aplikasi *e-Health* Simpati (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi) tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Bupati Sumedang periode 2018 – 2023, Dony Ahmad Munir selaku pucuk pimpinan daerah pun telah memahami bahwa diperlukan dukungan dan kolaborasi untuk mewujudkan keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dalam hal ini, aplikasi *e-Health* Simpati telah didukung oleh kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti kader posyandu, pimpinan daerah, puskesmas, pemerintah desa, dan dinas terkait lainnya yang memiliki tupoksi dalam penanganan *stunting* (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Kabupaten Sumedang telah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* sebesar 9% pada tahun 2023 yang tercantum di dalam Visi Sumedang Simpati (Munir, 2021). Bupati Sumedang juga meyakini bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah berhasil mendukung program penurunan *stunting* secara efektif, hal itu terlihat dari penurunan angka *stunting* sebesar 23% dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 – 2025, pemerintah Kabupaten Sumedang telah konsisten dalam menganggarkan kebutuhan anggaran dan belanja teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan peta jalan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) setiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2021 – 2022 telah menganggarkan sebesar 2 – 5% dari APBD untuk keperluan anggaran SPBE yang meliputi pengadaan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, upah pegawai, pemasaran, biaya operasional, dan pengembangan serta implementasi sistem. Selain bersumber pada APBD, anggaran SPBE juga diupayakan untuk mendapatkan dukungan dari dana eksternal, seperti dana CSR dari Perusahaan-perusahaan, hibah, bantuan pihak ketiga, dan partisipasi masyarakat melalui prosedur *public-private partnership* (PPP) ataupun sukarelawan. Untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah *stunting*, Bupati Sumedang periode 2018 – 2023, Dony Ahmad Munir juga melibatkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan mendorong seluruh camat untuk ikut berkontribusi aktif (Dahlan, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya untuk mengalokasikan berbagai sumber daya di lingkungan pemerintahannya untuk mengembangkan konsep SBPE di Kabupaten Sumedang, terutama terkait pengentasan *stunting* melalui aplikasi *e-Health* Simpati. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu kader posyandu di Desa Cimalaka, diungkapkan bahwa baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa, keduanya telah memiliki regulasi dan program yang jelas. Adapun beberapa program yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Cimalaka, seperti program penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita yang dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat supaya datang ke posyandu; program PMT pemulihan untuk balita berusia di bawah 2 (dua) tahun yang kurus dan *stunting* (program ini diberikan selama 3 bulan); program PMT untuk pemulihan ibu hamil yang diberikan selama 3 bulan dalam bentuk makanan dan susu; dan program pemantauan layanan khusus remaja putri yang berusia 15 – 22 tahun (berupa pemberian tablet

tambah darah dan pemeriksaan KB). Narasumber menambahkan bahwa sebenarnya program-program penyelesaian masalah *stunting* yang diadakan oleh pemerintah sudah baik, tetapi dalam implementasinya terhambat karena belum adanya kesadaran dari masyarakat, sehingga kader posyandu terkadang merasa kewalahan karena harus selalu melakukan *sweeping* terhadap masyarakat yang tidak datang ke posyandu. Menurutnya, salah satu alasan masyarakat sulit datang ke posyandu adalah karena mereka merasa jarak antara rumah dan posyandu cukup jauh. Meskipun regulasi dan aplikasi *e-Health* Simpati telah tersedia, tetapi rendahnya kesadaran masyarakat desa tentu saja akan mempersulit para kader posyandu untuk melakukan pendataan dan pelaporan terkait *stunting*.

3. Terhitung sejak awal peluncuran aplikasi *e-Health* Simpati (tahun 2018), pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting* dan pengembangan SPBE. Mulai dari penyusunan *policy brief* terkait gugus tugas penurunan *stunting* kabupaten, menerapkan peraturan intervensi *stunting* terintegrasi melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2019, menyusun dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku cegah *stunting* (mencakup pembahasan terkait advokasi, kampanye publik, mobilisasi sosial, dan komunikasi interpersonal tenaga kesehatan), serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021.
4. Sebagai bentuk upaya pencerdasan terkait penerapan aplikasi *e-Health* Simpati, pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa upaya, seperti menyelenggarakan kegiatan *Rembuk Stunting* yang dilakukan bersama seluruh SKPD yang telah menganalisis kondisi di lapangan, melalui kegiatan tersebut diharapkan SKPD mampu memberikan data terbaik guna meningkatkan kualitas data dalam aplikasi *e-Health* Simpati (Robiatul, 2023). Selain itu, Dinas Kabupaten Sumedang juga secara berkala melakukan berbagai upaya intervensi untuk menurunkan angka *stunting*, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan *workshop* dan sosialisasi pencegahan *stunting* melalui aplikasi *e-Health* Simpati terhadap para kader pembangunan manusia (KPM) yang merupakan para kader posyandu (DISKOMINFOSANDITIK, 2020a). Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang juga merencanakan kerja sama bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) melalui pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang dilakukan secara merata di desa-desa terpencil, melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi masyarakat miskin dan mendorong pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang juga berupaya untuk memasang *wifi gratis* pada 1.700 Posyandu untuk memperlancar koordinasi dan sosialisasi bersama komunitas. Rencana tersebut juga menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kenaikan angka prevalensi *stunting* sebesar 5,6% dari tahun 2021 ke tahun 2022 (Sekretariat Wakil Presiden, 2023). Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sofa, 2023) menunjukkan hasil bahwa pemahaman terkait digitalisasi program pelayanan pemerintah belum menjangkau seluruh masyarakat, hal itu terlihat di Desa Kertaharja, dimana perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat umumnya belum mengetahui serta memahami cara penggunaan aplikasi *e-Health* Simpati, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk kembali melakukan pemerataan sosialisasi terkait penerapan aplikasi *e-Health* Simpati kepada masyarakat desa terkait.

Capacity

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur (penelitian terdahulu, laman berita daring, regulasi terkait) yang telah dilakukan, penerapan dari elemen *capacity* dapat dilihat pada poin-poin berikut ini:

1. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2021 – 2022 telah mengalokasikan sebesar 2 – 5% dari APBD untuk keperluan anggaran SPBE dan mendapatkan bantuan dana eksternal dari berbagai pihak (dana CSR dari Perusahaan-perusahaan, hibah, bantuan pihak ketiga, dan partisipasi masyarakat melalui prosedur *public-private partnership* (PPP) ataupun sukarelawan), maka dana tersebut merupakan rencana anggaran yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan SPBE di Kabupaten Sumedang. Adapun Perusahaan yang terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pengembangan aplikasi

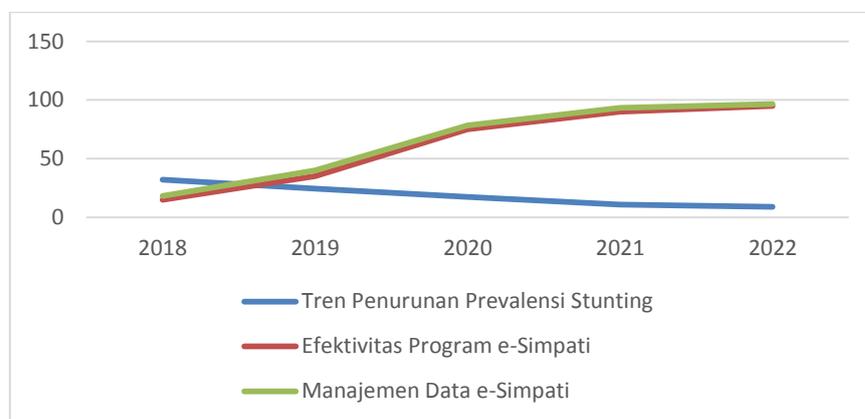
E-Health Simpati adalah Telkomsel. Selain itu, melalui keberhasilan dan prestasinya dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui aplikasi *e-Health* Simpati, Kabupaten Sumedang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp37 miliar di tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat, perolehan tersebut merupakan yang terbesar se-Jawa Barat (Azis, 2022)(DISKOMINFOSANDITIK, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afriyani, Wahidah dan Wibowo, 2021) juga menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya dalam hal ketersediaan anggaran di Desa Sukajaya sudah cukup baik dan efektif untuk mendukung terwujudnya pelayanan berbasis digital karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk penerapan program, salah satunya program *e-Health* Simpati. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran tidaklah menjadi hambatan bagi Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan aplikasi *e-Health* Simpati.

2. Dalam mewujudkan ketersediaan infrastruktur SPBE yang memadai, Pemerintah Kabupaten Sumedang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan (*provider*) internet guna memperluas jangkauan di daerah desa-desa pelosok dengan tujuan untuk mengubah Sumedang menjadi daerah digital dengan Tingkat literasi digital yang tinggi. Langkah ini juga diambil untuk memastikan seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang terkoneksi satu sama lain (Sumedang *Connected*) (Yuniawati, Bakti dan Nugraha, 2023). Kerja sama tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Telkomsel dalam bentuk bantuan sebanyak 300 unit gawai, 1.700 paket layanan data KartuHALO Teamplan untuk mendukung kebutuhan operasional komunikasi para kader Posyandu, lalu pemasangan lebih dari 890 BTS dengan teknologi *broadband* 4G LTE yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang, pemasangan alat *body thermal sensor* berbasis teknologi *Internet of Things (IoT)* yang diterapkan di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang, serta penyediaan paket layanan internet khusus dan kuota *conference* bagi para birokrat dalam mendukung kegiatan operasional di Kabupaten Sumedang (Telkomsel, 2021). Kerja sama tersebut tentu saja dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyediakan infrastruktur pelayanan SPBE yang memadai dan mendukung pengembangan berbagai program atau aplikasi berbasis digital di Kabupaten Sumedang. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang juga turut memberikan dukungan penuh kepada desa-desa yang menjadi *pilot projects* program-programnya, salah satunya Desa Sukajaya yang mendapatkan dukungan anggaran dan teknologi untuk penerapan program *e-health* Simpati (Afriyani, Wahidah, dan Wibowo, 2021). Sehingga, infrastruktur IT sebagai sarana pendukung pelayanan berbasis digital di Desa Sukajaya sudah memadai, mulai dari ketersediaan website, stabilisasi server, wifi yang dapat diakses oleh siapapun, hingga kecepatan internet yang cukup baik.
3. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang memadai pada penerapan aplikasi *e-Health* Simpati, Pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Telkomsel selaku penyedia layanan dan Sawala Foundation selaku pengembang aplikasi. Kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumedang. Sehingga, dalam hal *web developer* dan *android developer*, Pemerintah Kabupaten Sumedang dibantu oleh Telkomsel dan Sawala Foundation, hal ini menjadi salah satu kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengelola dan mengoperasikan platform *e-Health* Simpati. Selain itu, untuk meningkatkan intervensi konvergensi penurunan *stunting* terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki 8 (delapan) aksi, yang meliputi analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk *stunting*, perbub terkait peran desa, kader pembangunan manusia (KPM), manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan (Husni, 2023). Melalui berbagai kegiatan *workshop* dan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memberikan dukungan pencerdasan bagi para kader posyandu di Kabupaten Sumedang, tercatat pada tahun 2020 terdapat 20 orang kader posyandu di Desa Cilembu dan Mekarbakti yang telah menjadi pelopor pengaplikasian aplikasi *e-Health* Simpati dalam pelaporan data *stunting* (DISKOMINFOSANDITIK, 2020b). Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afriyani, Wahidah, dan Wibowo, 2021), menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih menjadi kendala di salah satu desa di Kabupaten Sumedang, yaitu di Desa Sukajaya. Jumlah

operator yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terkait pengoperasian sistem layanan berbasis digital masih terbatas, sehingga perkembangan inovasi digital di desa tersebut menjadi terhambat. Hal ini tentu saja menjadi salah satu “PR” bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pelatihan terhadap aparatur- aparatur pemerintahannya yang berada di Tingkat desa karena mereka merupakan pihak-pihak yang lebih dekat dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat.

Value

Pada hakikatnya, keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya dilihat dari dukungan pemangku kepentingan dan kapasitas aparatur pemerintahan semata, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selaku sasaran program. Dalam penerapan aplikasi *e-Health Simpati* di Kabupaten Sumedang, dapat dikatakan bahwa aplikasi ini efektif dalam membantu melakukan pemetaan stunting yang mendorong penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang. *E-Health Simpati* telah menunjukkan efektivitasnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 melalui penurunan tren angka prevalensi stunting. Selain itu, efektivitas program dan manajemen data dari aplikasi ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun data penurunan tren prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang, efektivitas program, dan manajemen data *e-Health Simpati* dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. Tren Penurunan Prevalensi Stunting, Efektivitas Program, dan Manajemen Data e-Health Simpati Tahun 2018 – 2022

Sumber: (Gunawan, 2022) & (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2023)

Penerapan aplikasi *e-Health Simpati* juga telah memberikan manfaat bagi berbagai pihak, meliputi masyarakat (khususnya orang tua), kader posyandu, pihak eksekutif pemerintah, dan desa atau puskesmas. *E-Health Simpati* dapat membantu masyarakat, khususnya para orang tua dalam melakukan pengecekan status gizi anak, hasil penimbangan berat badan anak, dan mendapatkan informasi pencegahan stunting. Bagi para kader posyandu, *e-Health Simpati* dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas kader terkait analisa, pelaporan, dan rekomendasi dalam pengentasan masalah stunting di desa dan kecamatan. Para pihak eksekutif pemerintah dan desa atau puskesmas juga lebih mudah dalam melakukan *monitoring*, evaluasi, serta pengelolaan data terkait perkembangan *stunting* di berbagai posyandu Kabupaten Sumedang secara *real time*, akurat, dan *paper less*. Akan tetapi, di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Husni, 2023) menunjukkan bahwa pengimplementasian *digital governance* pada aplikasi *e-Health Simpati 2.0* dapat dikatakan belum beroperasi secara optimal, hal itu dibuktikan dengan belum terintegrasinya aspek dari manajemen informasi data secara optimal, terutama terkait dengan terbatasnya akses publik terhadap beberapa fitur dalam aplikasi. Dengan demikian, di samping manfaat-manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat, pemerintah juga perlu mengkaji lebih dalam untuk menemukan *best practices* terkait perbaikan aksesibilitas dalam aplikasi *e-Health Simpati*, supaya aplikasi dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing elemen *support*, *capacity*, dan *value* dalam penerapan aplikasi *e-Health* Simpati di Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa pada elemen *support*, penerapan *e-Health* Simpati di Kabupaten Sumedang berhasil berkat dukungan kolaboratif, alokasi anggaran yang konsisten, penerapan regulasi yang tepat dan sosialisasi berkelanjutan. Meskipun telah mencapai prestasi dalam menurunkan prevalensi *stunting*, masih diperlukan upaya pemerataan pengetahuan dan pemahaman di tingkat desa serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Pada elemen *capacity*, pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki infrastruktur dan anggaran yang memadai, tetapi perlu pelatihan dan peningkatan SDM di tingkat desa. Dan pada elemen *value*, manfaat *e-Health* Simpati terlihat dalam penurunan *stunting* dan peningkatan efektivitas program yang menunjukkan kinerja yang baik dari tahun 2018-2022. Dengan demikian, fokus SDM dan pengetahuan digital perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan inovasi digital.

REFERENSI

- Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572>
- Arief, H., Ekorian, M., Rahardian, A. S., & Widodo, T. (2023). Good Practices Reducing Stunting in Sumedang Regency. *Science and Environmental Journal for Postgraduate*, 5(2), 1–8. <http://senjop.pjj.unp.ac.id/index.php/senjop>
- Azis, N. (2022). *Sederet Prestasi Pemkab Sumedang: Tekan Stunting hingga 7 Kali WTP*. Detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6002041/sederet-prestasi-pemkab-sumedang-tekan-stunting-hingga-7-kali-wtp>
- Calista, D. J., & Melitski, J. (2007). E-GOVERNMENT AND E-GOVERNANCE: CONVERGING CONSTRUCTS OF PUBLIC SECTOR INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES. *Public Administration Quarterly*, 31(1/2), 87–120. <http://www.jstor.org/stable/41288283>
- Chen, Y.-C., & Perry, J. (2016). *Public Performance & Management Review Outsourcing for E-Government*. 26(4), 404–421. <https://doi.org/10.1177/11530957603252590>
- Dahlan, A. (2022). *Pemkab Sumedang Libatkan Camat dan Kepala SKPD untuk Tangani Stunting*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/412847/pemkab-sumedang-libatkan-camat-dan-kepala-skpd-untuk-tangani-stunting>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. (2023). *STUNTING & UPAYA SUMEDANG SAKTI*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/materi-stunting-dan-upaya-sumedang-sakti>
- DISKOMINFOSANDITIK. (2020a). *Dinkes Terus Intervensi Stunting*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/dinkes-terus-intervensi-stunting>
- DISKOMINFOSANDITIK. (2020b). *Pemkab Sumedang, Sawala dan Telkomsel Kembangkan Aplikasi Stunting*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pemkab-sumedang-sawala-dan-telkomsel-kembangkan-aplikasi-stunting>
- DISKOMINFOSANDITIK. (2022). *Bupati: Pemberian Penghargaan adalah Bonus dari Kerja Keras*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/bupati-pemberian-penghargaan-adalah-bonus-dari-kerja-keras>
- Gunawan, A. (2022). *Angka Stunting di Sumedang Terus Menurun - Kabupaten Sumedang*. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/angka-stunting-di-sumedang-terus-menurun>
- Hadi, F. U., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2023). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Dukcapil Smart di Kabupaten Bantul. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39856>
- Halachmi, A. (2004). *E-Government Theory and Practice: The Evidence from Tennessee (USA)*. 1–19.
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(April), 9–21.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Intensifkan Pemanfaatan SPBE, Sumedang Berhasil Turunkan Stunting Hingga 8,27 Persen*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

- <https://setkab.go.id/intensifkan-pemanfaatan-spbe-sumedang-berhasil-turunkan-stunting-hingga-827/>
- Husni, M. N. A. (2023). Digital Governance Pada Platform Simpati 2.0 Di Kabupaten Sumedang. *Tahun*, 9(1), 2723–2530.
- Kenanga, M. P., Rahmawati, S. D., Surtimanah, T., Mahwati, Y., & Komalaningsih, S. (2023). ANALISIS SPASIAL KELUARGA BERISIKO STUNTING DENGAN KEJADIAN STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 (Studi Pada Data Pendataan Keluarga Dan Pemutakhirannya Serta Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2022) Presiden Republik Indonesia Nomor 72. *Sehat Masada Journal*, 17(2), 1–9.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., Gde, I. K., & Putra, D. (2020). *Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang akan dilaksanakan adalah Visi “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali .” Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisa. 1.*
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112.
- Munir, D. A. (2021). *Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Sumedang.*
- Ningrum, D., Lindayani, E., Faozi, A., Ma’ruf, N. M., & Fauziyah, R. N. (2023). Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Makanan Sehat untuk Mencegah Stunting pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 12–1. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5645>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- Oktaria Batubara, S., Yetti, K., & Sukmarini, L. (2023). Analisis Faktor Resiko Stunting. *Telp*, 14(1), 3–6. [http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7476/Artikel Sakti Okta %28Salatiga%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7476/Artikel%20Sakti%20Okta%28Salatiga%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Patimah, S., Silalahi, U. A., & ... (2022). Kajian Kasus Pada Bayi Di Bawah Usia 2 Tahun Dengan Stunting. *Indonesian Journal of ...*, 2(4), 357–366. <http://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/view/184%0Ahttp://ijohm.rcipublisher.org/index.php/ijohm/article/download/184/134>
- Prawira, M. G., & Paraniti, A. A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 82–89. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828>
- Robiatul, E. (2023). *Strategi Bupati Dony Tekan Angka Stunting di Sumedang.* Jpnn.Com. <https://www.jpnn.com/news/begini-strategi-bupati-sumedang-dalam-menekan-angka-stunting>
- Sekretariat Wakil Presiden. (2023). *Kejar Turunkan Stunting, Sumedang Organisir Mahasiswa KKN ke Pelosok Desa.* KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI: SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN. <https://stunting.go.id/kejar-turunkan-stunting-sumedang-organisir-mahasiswa-kkn-ke-pelosok-des/>
- Sofa, N. S. N. (2023). SOSIALISASI PENGENALAN APLIKASI E-SIMPATI KEPADA MASYARAKAT DI DESA KERTAHARJA KECAMATAN TANJUNG KERTA KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sebelas April*, 1–4.
- Telkomsel. (2021). *Telkomsel Berkolaborasi dengan Pemkab Sumedang Hadirkan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis E-Health “SIMPATI.”* Telkomsel. <https://www.telkomsel.com/about-us/news/telkomsel-berkolaborasi-dengan-pemkab-sumedang-hadirkan-aplikasi-sistem-pemerintahan>
- Wijaya, P. S. (2023). *Indeks SPBE Tertinggi se-Indonesia Sumedang Raih Digital Government Award - Kabupaten Sumedang.* <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/indeks-spbe-tertinggi-se-indonesia-sumedang-raih-digital-government-award>
- World Bank. (2015). *e-Government.* The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
- Yuniawati, F., Bakti, I., & Nugraha, A. R. (2023). City branding Kabupaten Sumedang melalui program Sumedang Happy Digital Region. *Comdent: Communication Student Journal*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i1.44684>